

Nomor : B/ 420 /AA.05/2023
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

27 November 2023

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat
di
Gerung

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada **Pemerintah Kabupaten Lombok Barat**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada **Pemerintah Kabupaten Lombok Barat**. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya. Khusus pada tahun 2023, beberapa instansi pemerintah juga dipilih untuk dilakukan pendalaman atas upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Pemerintah Kabupaten Lombok Barat** telah menindaklanjuti **sebagian besar** rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan bimbingan teknis kepada seluruh perangkat daerah (PD) untuk menyempurnakan pohon kinerja sehingga lebih sesuai dengan kaidah Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021;
- b. Melakukan sosialisasi atas aplikasi *e-SAKIP* Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada seluruh PD dan memantau kepatuhan pengisian seluruh PD di aplikasi tersebut;
- c. Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD;
- d. Telah disusun Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 10 Juli 2023.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Pemerintah Kabupaten Lombok Barat** menunjukkan bahwa nilai sebesar **66,72** dengan predikat **“B”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Baik”**, yaitu **implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	22,43	24,16
b. Pengukuran Kinerja	30	16,35	16,65
c. Pelaporan Kinerja	15	9,71	9,83
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,60	16,08
Nilai Hasil Evaluasi	100	64,09	66,72
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada **Pemerintah Kabupaten Lombok Barat** tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Masih terdapat perencanaan kinerja pada sebagian unit kerja yang merumuskan sasaran strategisnya belum sepenuhnya berorientasi outcome pada level kinerjanya dan indikator kinerja belum sepenuhnya relevan dan memberikan *continuous improvement* pada pencapaian kinerja yang ditetapkan;
- Meskipun secara umum pohon kinerja pada level pemerintah kabupaten dan perangkat daerah telah disusun, namun masih diperlukan penyempurnaan. Hal ini karena hubungan logis/*logical framework* antar level kinerja belum sepenuhnya tergambar dengan baik sehingga kinerja setiap unit kerja dan individu belum sepenuhnya dapat dipastikan mendorong tercapainya kinerja strategis lembaga;
- Pemanfaatan pohon kinerja sebagai dasar untuk penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga keselarasan antara pohon kinerja yang telah disusun dengan dokumen perencanaan yang ada belum tergambar dengan baik.

2) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Masih terdapat beberapa IKU perangkat daerah yang formulasi pengukuran kinerjanya belum jelas sehingga menimbulkan beberapa persepsi dalam memahami data kinerja yang dibutuhkan indikator kinerja tersebut;
- Meskipun telah memiliki pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara elektronik melalui aplikasi e-SAKIP, namun masih ditemukan PD yang belum secara aktif dan *update* dalam pengukuran capaian kinerja secara. Selain itu belum terlihat adanya *feedback* perbaikan dari pimpinan terkait pencapaian kinerja yang tidak tercapai baik di level Kabupaten maupun PD;
- Dalam pengukuran data kinerja, masih terdapat data kinerja yang belum sepenuhnya andal untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya target pada level PD yang masih stagnan dan kurang menantang.

3) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Laporan kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah belum sepenuhnya mengungkapkan analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dan juga analisis upaya perbaikan kedepan pada setiap pencapaian kinerja;
- Informasi kinerja yang telah dituangkan dalam LAKIP PD belum dimanfaatkan dengan baik, terutama pada proses penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja ke depan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada level pusat, hal ini ditunjukkan dari masih terdapat beberapa kinerja yang capaian target kinerjanya belum tercapai;
- Kualitas SDM evaluasi AKIP di internal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum merata. Masih ada perbedaan persepsi antara evaluator internal dalam menuangkan kondisi implementasi SAKIP PD yang digambarkan ke dalam LHE AKIP yang disampaikan.

5) Akuntabilitas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan

Evaluasi akuntabilitas terhadap upaya pengelolaan program kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dilakukan dengan 1). mendapatkan gambaran umum pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui presentasi dan diskusi, serta 2). menganalisis efektivitas biaya (*cost-effectiveness analysis*) yang dilakukan dengan membandingkan data anggaran kemiskinan pada SIPD dengan data penurunan jumlah masyarakat miskin pada data regsosek BPS. Berdasarkan hasil evaluasi, didapat hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan data SIPD, besaran alokasi belanja dengan *tagging* penanganan kemiskinan ekstrem pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah sebesar Rp. 261.419.222.615 atau 14,76% dari total pos belanja APBD. Alokasi tersebut digunakan untuk membiayai 95 sub kegiatan;

- Belanja terbesar penanganan kemiskinan ekstrem dialokasikan pada sub kegiatan “*Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar*” yaitu sebesar 24,57% dan terkecil adalah pada sub kegiatan “*Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi*” yang hanya 0,00%;
- Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada September 2023, tingkat kemiskinan Kabupaten Lombok Barat adalah sebesar 13,67% atau naik 0,28% dibandingkan dengan tahun 2022;
- Hasil analisis tim evaluator masih menemukan sub kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kemiskinan ekstrem, serta alokasi anggaran pendukung (konsumsi rapat, biaya operasional, perjalanan dinas, dan lainnya) yang masih cukup besar.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mereviu kembali perencanaan kinerja pada seluruh unit kerja untuk dapat merumuskan sasaran strategisnya lebih berorientasi *outcome* pada level kinerjanya dan juga memastikan indikator kinerja yang dimiliki dapat relevan dan memberikan *continuous improvement* pada pencapaian kinerja yang ditetapkan;
- 2) Memastikan penjabaran kinerja dimulai dengan menyusun pohon kinerja berdasarkan *logical framework* yang menggambarkan hubungan “sebab-akibat” dan berdasarkan *Critical Success Factor (CSF)* antar level kondisi kinerja yang dijabarkan sehingga dapat dipastikan pencapaian kinerja level bawah berpengaruh pada pencapaian kinerja level di atasnya;
- 3) Mendorong pemanfaatan pohon kinerja yang telah disusun dengan menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan, sehingga keselarasan antara pohon kinerja dan dokumen perencanaan dapat tergambar dengan baik;
- 4) Memastikan seluruh perangkat daerah telah memiliki formulasi pengukuran kinerja yang jelas sehingga akan lebih mudah untuk memahami data kinerja yang dibutuhkan pada indikator kinerja tersebut, salah satunya dengan cara mereviu formulasi pengukuran pada IKU;
- 5) Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh unit/satuan kerja untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk *controlling* pimpinan unit/satuan kerja terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki;

- 6) Memastikan kembali pengukuran kinerja yang dilakukan disertai dengan data yang relevan atau menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sehingga data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran capaian kinerja dapat diandalkan sehingga proses penentuan target akan menjadi lebih baik;
- 7) Meningkatkan kualitas dokumen laporan kinerja dengan mengungkapkan analisis seluruh pencapaian realisasi kinerja yang diperjanjikan, khususnya dalam memberikan analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dan juga analisis upaya perbaikan kedepan pada setiap pencapaian kinerja;
- 8) Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam laporan kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dan diharapkan agar dituangkan dalam dokumen perencanaan ke depan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja kedepan, terkhusus kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun sebelumnya;
- 9) Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja;
- 10) Meningkatkan kualitas evaluasi AKIP internal dengan menjabarkan secara spesifik temuan yang menjadi masalah di tiap PD dan rekomendasi yang mampu menyelesaikan temuan tersebut, kemudian dilakukan monitoring secara berkala guna memastikan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan evaluasi AKIP internal telah sesuai dengan yang dimaksud oleh evaluator internal;
- 11) Terkait dengan tema kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat agar menyempurnakan pohon kinerja kemiskinan yang sudah disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lapangan yang menyebabkan kemiskinan di wilayah Kabupaten Lombok Barat, sehingga dapat diketahui permasalahan kinerja mana saja yang perlu menjadi fokus utama dalam pengentasan kemiskinan;
- 12) Mendorong keterlibatan seluruh stakeholder di wilayah Kabupaten Lombok Barat, baik internal Pemda maupun eksternal, dengan berdasarkan informasi crosscutting dan strategi kinerja yang sudah disusun berdasarkan pohon kinerja kemiskinan yang dimiliki;
- 13) Pimpinan daerah beserta Bappeda agar melakukan reviu atas seluruh program, kegiatan, serta aktivitas yang ada beserta anggarannya dengan memanfaatkan pohon kinerja kemiskinan yang telah disusun, sehingga dapat diketahui sejauh mana dampaknya dalam menurunkan kemiskinan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
4. Bupati Lombok Barat.